

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP TAHANAN RESIDIVIS
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Kota Palopo)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana

Hukum islam jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas syari'ah dan hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Fiqhi Jabbar

Nim: 10500112047

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

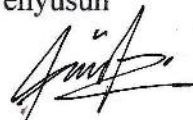
Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FIQHI JABBAR
NIM : 10500112047
Tempat / Tgl lahir : Palu, 12 September 1993
Jurusan / Prodi / Konsentrasi : Ilmu Hukum
Fakultas / Progam : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Datu Pagentungan, Samata.
Judul : Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga
Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Studi
Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palopo)

Menyatakan dengan kesungguhan dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang tertera dalam pernyataan adalah hasil karya sendiri. Dan jika di kemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan duplikat, tiruan dan merupakan bentuk plagiat karya orang lain. Maka dengan ini skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi Hukum.

Makassar, 02 Februari 2016

Penyusun



FIQHI JABBAR

NIM : 10500112047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **FIQHI JABBAR, NIM: 10500112047** Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Study Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palopo)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 29 Februari 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Pembimbing I

Pembimbing II



Ahkam Jayadi, SH., MH
NIP. 19611024 198703 1 003



Abdi Wijaya, S.S., M. Ag.
NIP. 19711005 200501 1 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palopo)”, yang disusun oleh saudara Fiqhi Jabbar, NIM: 10500112047, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10, bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1437 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Maret 2016

1 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Eman Solaiman, SH., MH	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam Jayadi, SH., MH.	(.....)
Pembimbing II	: Abdi Wijaya, S.S., M. Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR



Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt. karena dengan Ridho dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "*Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis*". Shalawat dan Salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membawa manusia dari alam kebodohan (jahiliyah) menuju alam yang berperadaban, seperti saat ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, berbagai hambatan dan kesulitan yang di hadapai. Namun atas bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hal tersebut dapat teratasi.

Penyusun menyadari betul bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun penulisan. Kekurangan-kekurangan tersebut terutama disebabkan kelemahan dan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penyusun sendiri. Namun dengan kearifan dan bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan teguran, saran, dan kritik. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat diperkecil sehingga skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Istiqamah, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Rahman Syamsuddin, SH., MH selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar
4. Ahkam Jayadi, SH., MH, selaku pembimbing I dan Abdi Wijaya, S.S., M. Ag, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk atau mengarahkan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag, Dr. Sabri AR, M.Ag, dan Rahman Syamsuddin, SH., MH, selaku penguji konprehensif keislaman dan pengetahuan hukum.
6. Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag, selaku penguji I munaqasyah dan Eman Solaiman, SH., MH, selaku penguji II munaqasyah.
7. Skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Jabbar dan Ibunda Nursiah, serta paman (sulaiman) dan bibi (nagawati). Yang telah membesarkan, mengasuh, menyayangi, dan menasehati dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan berupa materi dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk penyusun. Dan juga buat saudara-saudariku tersayang

Sunarwan Sulaiman S.IP, Yuliana Sulaiman S.K.M., Nurfadillah Sulaiman dan Randy.

8. Para bapak dan ibu dosen serta seluruh staf fakultas syariah dan hukum yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya dan pelayanan dalam penyelesaian studi mahasiswa.
9. Seluruh keluarga besar H.Salondong yang telah menginspirasi, memsupport dan mendoakan selalu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sabhatku tersayang “Hibernate” Athy, Ayhu, Anis, Amhy, Besse, Enchy, Mitha, Ria, dan Silva, yang selalu ada hingga saat ini, Terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
11. Terkhusus saudara-saudaraku di Study Club yang selalu ada disaat susah maupun senang, Terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
12. Kakak-kakak senior yang telah banyak menginspirasi penulis kak irsan, kak yogi, kak jaya, kak firman, kak ria, kak eka, kak citra, kak ningsih, dan kak rabita.
13. Tidak terkecuali seluruh keluarga besar fakultas syariah dan hukum terkhusus jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012, selaku teman-teman seperjuangan dibangku perkuliahan.

Akhirul kalam, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan di Ridhai kepada pembacanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalam

Makassar, 02 Februari 2016

Penyusun

FIQHI JABBAR

Nim: 10500112047



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana, Pemidanaan dan Tindak Pidana	12
B. Lembaga Pemasyarakatan	20
C. Tindak Pidana Ulang	31
D. Kerangka Konseptual	38

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen penelitian	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis data	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	42
B. Analisis Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	60
C. Faktor Seseorang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kembali	64
D. Analisis Hukum Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Implikasi	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

BIOGRAFI PENULIS	79
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN	80
-----------------------	-----------

ABSTRAK

NAMA PENULIS : FIQHI JABBAR
NIM : 105001122047
JUDUL SKRIPS : ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TAHANAN RESIDIVIS (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO).

Skripsi ini membahas tentang lembaga pemasyarakatan, khususnya terkait residivis dan pembinaan yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Berhubungan dengan hal tersebut penyusun mengangkat judul yaitu Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Palopo). Dan penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang menjadi residivis dan mengetahui proses pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan terkhusus tahanan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas Iia Palopo.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara pengambilan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, melalui proses wawancara (*interview*) dari pihak yang berwenang menangani permasalahan yang ada dan dengan cara pengamatan (*observation*). Sedangkan pengambilan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen (*documentary studies*) atau kepustakaan baik berupa buku, dokumen perundang-undangan, artikel, hasil karya tulis para ahli, serta sumber lain yang berkaitan dengan yang diteliti.

Hasil penelitian yang diperoleh penyusun adalah di lingkungan sosial Kota Palopo banyak dijumpai berbagai kasus atau jenis kejahatan, bahkan pelaku tersebut tidak hanya melakukan kejahatan satu kali saja bahkan berkali-kali, walaupun pelaku tersebut ditangkap dan dihukum pidana tidak membuat mereka jera. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Dan adapun proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas Iia Palopo terhadap tahanan residivis ada dua cara pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian

Implikasi dari hasil penelitian yaitu dalam hal mengurangi tindak pidana, menurut penyusun perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah terkait kemiskinan masyarakat, dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi mereka jika telah bebas dan untuk lingkungan sosial mantan narapidana agar lebih mengawasi dan membimbing kembali mantan narapidana jika telah bebas agar tidak sembarang terjerumus pergaulan tidak baik yang dapat membuat mereka melakukan tindak pidana kembali. Disarankan agar proses pembinaan kepribadian lebih intensif lagi diberikan terhadap narapidana agar mereka betul-betul sadar dan tidak mengulangi perbuatan mereka kembali jika telah bebas. Adapun pembinaan kemandirian yang dibutuhkan yaitu disarankan keterampilan-keterampilan yang menunjang mereka di zaman modern ini, misalnya kursus komputer, kursus bahasa Inggris dan cara menjalankan mesin fotokopi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum atau negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaannya hanya berdasarkan hukum yang berlaku dengan cara yang ditentukan dalam hukum tersebut. Tujuan negara hukum bahwa suatu perkara ditetapkan keputusannya sesuai dengan kebenaran.

Negara hukum bukan berarti bebas dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak pula kejahatan-kejahatan yang terjadi di tanah air yang membuat semakin banyak pula penghuni lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, misalnya: polisi yang mengurus proses penyidikan, kejaksaan yang mengurus penuntutan, kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis dan lembaga pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Yang Sudah Diamandemen* (Jakarta: Apollo Lestari, t.th.), h.12.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:105.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا
تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”²

Seseorang yang bersalah telah melakukan kejahatan atau berstatus sebagai narapidana, tidak mesti hak mereka dibedakan dengan warga Negara yang pada umumnya. meskipun berstatus sebagai narapidana dan berada dilingkungan lembaga pemasyarakatan, Indonesia sebagai Negara hukum tetap menjaga hak-hak mereka yaitu hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (i) sebagai berikut:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Ummul Mukminin* (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h. 95.

Persoalan hukuman yang diberikan oleh seseorang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan di Indonesia, dikenal dengan penjara atau yang lebih dikenal pada saat ini yaitu pemasyarakatan. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan (pasal 10 KUHP dan Undang-undang No.20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.³

Sistem kepenjaraan mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah penjerahan, artinya seorang yang melakukan tindak pidana dibuat jerah dan tidak melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan yang lebih di kenal dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyaraktatn yaitu:

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁴

³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyaraktatn* (Yogyakarta: liberty, t.th.), h. 3.

⁴ Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensir Indonesia* (Bandung : Armico, 1984), h. 56.

Maraknya tingkat kejahatan dalam berbagai macam bentuk dilakukan oleh oknum atau individu baik sifatnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penipuan dan sebagainya. Lembaga pemasyarakatan semakin dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya dalam membina tahanan dan narapidana utamanya tahanan residivis agar mereka sadar terhadap pelanggaran dan kejahatan yang diperbuat agar dimasa mendatang tidak mengulangnya lagi.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana setiap pembinaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa pembinaan di lapas selama ini kurang maksimal, hal ini disebabkan banyaknya pelaku kejahatan keluar masuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali melakukan tindak pidana.

Dalam kenyataan, para pelaku kejahatan sangat banyak dilakukan oleh para residivis. Para mantan narapidana tersebut dalam melakukan aksinya, sering nekat melebihi penjahat pemula. Sebagai bukti, dalam setiap pemberitaan media cetak/surat kabar yang sering memuat berita kriminalitas termasuk kota palopo para pelakunya adalah orang-orang mantan narapidana (residivis).

Pakar hukum dan kriminolog mengatakan bahwa konsep penjara ataupun lembaga pemasyarakatan, sebenarnya telah lama gagal untuk memperbaiki atau membina narapidana.

Walaupun selama di lembaga pemasyarakatan narapidana diajari, didik serta diharuskan berproduksi. Hal tersebut bukanlah menunjukkan jaminan, bahwa setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan kehidupan akan sesuai dengan butir-butir pemasyarakatan.

Adapun hal tersebut dipengaruhi beberapa hal, antara lain proses industrialisasi yang ditunjang teknologi canggih mensyaratkan adanya pemakaian mesin-mesin dan membutuhkan tenaga manusia yang memiliki keahlian dalam pengoperasiannya. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menambah semakin ketatnya kompetisi mendapatkan lowongan pekerjaan, karena sebagian pekerjaan yang tadinya masih ditangani manusia sudah tergantikan dengan mesin, yang pada akhirnya menambah jumlah pengangguran.

Berbagai jenis keterampilan praktis yang diberikan selama di lembaga pemasyarakatan seperti Pembuatan Tas, Perbengkelan, Las, Binatu, Menjahit Pakaian atau Cukur Rambut diharapkan sebagai bekal mencari penghasilan yang baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh eks narapidana.

Disamping itu ada pula bidang pelatihan yang sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan jaman (dapat dikatakan ketinggalan) seperti keterampilan membuat alat-

alat rumah tangga yang ternyata alat tersebut sudah jarang digunakan oleh ibu-ibu sehingga tidak dapat bersaing di pasaran.⁵

Pembinaan yang diberikan seperti yang di atas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif dengan biaya produksi yang sangat tinggi dan hasil yang tidak maksimal. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan Residivis.

Dengan demikian tidak mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali di masyarakat. Selain itu, tentu saja persoalan stigma negatif yang menempel pada “label” bekas narapidana menyebabkan banyak orang atau perusahaan tidak mau menerimanya sebagai pegawainya.

Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan perbuatan melawan hukum.

⁵Ika Atikah, “Pembinaan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ika Atikah* (Taerang: STIH PAINAN, 20 November 2014) <http://lppm.stih-painan.ac.id/pembinaan-narapidana-di-dalam-lembaga-pemasyarakatan.html> (15 Juni 2015).

Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, didikan berdasarkan asas pancasila, dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan negara, karena itu mereka perlu di didik, dilatih untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan apabila kelak keluar dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya dalam masyarakat. Semua ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertibat, menyadari kesadaran dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.⁶



⁶ Zainal Amrullah, "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Tahanan dan Narapidana di Kabupaten Sinjai", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2009), h. 20.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan residivis dan pembinaannya, telah menarik perhatian peneliti untuk membahasnya lebih jauh melalui suatu penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang menjadi residivis?
2. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo terhadap tahanan residivis?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus yakni Analisis hukum terkait perlakuan lembaga pemasyarakatan terhadap tahanan residivis (study kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota palopo) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Keputusan menteri kehakiman No.:M 02-PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan.

D. Kajian Pustaka

Dalam judul skripsi *Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palopo)* dari hasil penelusuran yang telah dilakukan maka di temukan beberapa literatur yang menjadi acuan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dari firman Allah.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
4. Buku yang ditulis oleh Bambang Poernomo, dengan judul *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Dalam buku ini memberikan gambaran sistem pemasyarakatan yang ada di indonesia, masalah hukuman yang diberikan oleh seseorang yang terkait dengan kejahatan dan pemberian sanksi pidananya.
5. Buku yang berjudul *Hukum Pidana dan Penologi*, buku yang ditulis oleh Widodo dan Wiwik Utami ini menjelaskna tentang perubahan konsep pemasyarakatan yang dulunya adalah penjara, dimana pemasyarakatan mengandung makna mengayomi terpidana dalam hal ini dimaksudkan adalah orang tersesat.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang menjadi Residivis.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan terkhusus tahanan Residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIa Kota Palopo.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Manfaat Akademik

Sebagai kegunaan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga agar bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang konsentrasi hukum pidana.

B. Manfaat Praktek

1. Sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa jurusan ilmu hukum serta pihak lain yang ingin mengetahui seperti apa pelaksanaan warga binaan lembaga pemasyarakatan di kota palopo terkhususnya.

2. Sebagai bahan masukan petugas lembaga pemasyarakatan khususnya bagi Departemen kehakiman dalam menetapkan kebijakan pembinaan tahanan dan narapidana.
3. Sebagai bahan bagi lembaga pemasyarakatan agar lebih mengoptimalkan peranannya dalam memberikan pembinaan terkhusus bagi tahanan Residivis agar tahanan residivis tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.
4. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk menerima kembali seorang mantan narapidana, karena mantan narapidanaa tidak sepenuhnya tetap memiliki sifat jahat karena sebelumnya telah diberikan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan.
5. Sebagai bahan bagi pemerintah kota maupun pemerintah pusat agar memperhatikan pengangguran dan upah pekerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana, Pemidanaan dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.¹

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 1.

² Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.27.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.³

2. Pengertian Pemidanaan

Istilah Pemidanaan berasal dari inggris yaitu *comdemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

³ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27.

Tujuan Pemidanaaan:

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana).⁴

a. Pidana Pokok (*Hood straffen*)

1. Pidana mati (*Death penalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP).

⁴ R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.186.

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2. Pidana penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3. Pidana kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4. Pidana denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (*Bijkomende straffen*)

merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku , yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perempasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pembedaan dan tujuan dari dijatuhkannya pembedaan. Pada umumnya teori-teori pembedaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori retributif

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung).

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan.⁵

Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana menurut teori ialah pembalasan.⁶

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan

⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013). h. 87

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). h. 23.

absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defense).⁷

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tatatertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (rechtsorde; social orde) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan pembedaan, yang dimana menurut sifatnya adalah: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Teori relatif ini berasal pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, tujuan preventif yaitu mencegah, mencegah bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan tiga

⁷ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011). h. 27-28.

bagian, yaitu yang bersifat individual, tujuan bersifat publik dan bersifat jangka panjang.

Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksud agar pelaku menjadi jahat untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik adalah agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan *deterrence* jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁸

c. Teori gabungan (*Vernegins Theorien*).

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013). h. 92-93.

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan di atur pada pasal 1 ayat 3 yaitu “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kesimpulannya bahwa lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk membimbing narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (Residivis) sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana penjara dalam pemasyarakatan memerlukan keterampilan antara sesama unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut yaitu narapidana masyarakat dan petugas-petugas lembaga pemasyarkatan atas rumah tahanan maupun instansi-instansi yang terkait lainnya.⁹

⁹ Atmasasmita Romli, *Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana* (Bandung: Alumni, 1975), h. 129.

2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.

Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (Staatsblad 708 Tahun 1917) bahwa "penjara" itu dapat diartikan sebagai:

1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum.

Menurut Ramli Atmasasmita Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
2. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I, Bisa menampung 500-1000 narapidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A, Hanya menampung kurang dari 500 narapidana.
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B, Sedangkan Kelas IIB berisi 300-400 narapidana.¹⁰

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum

¹⁰ Ami, "Lembaga Pemasyarakatan juga Lembaga Pendidikan", *Blog Ami*. <http://ami62.blogspot.co.id/2011/01/lembaga-pemasyarakatan-lp-juga-lembaga.html> (29 Juni 2015).

dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹¹

Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali kedalam masyarakat secara baik dan produktif. Pemasyarakatan tersebut merupakan suatu proses pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan.

¹¹ Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, "Pemenuhan Hak Narapidana dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 30-33.

Menurut Hamzah tujuan pemasyarakatan juga memasukkan mantan narapidana kedalam masyarakat sebagai warga negara yang baik, dan melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan.

Konsep pemasyarkatan kali pertama juga dijabarkan oleh sahardjo, Menurut Sahardjo tujuan pidana adalah pemasyarkatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang harus diayomi terhadap pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah dalam masyarakat indonesia.¹²

Sistem pemasyarkatan terdiri atas dua kata yaitu sistem dan pemasyarakatan. Pengertian sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari atas bagian-bagian dan antara bagian-bagian itu tidak boleh saling tumpah tindih, bertentangan atau menimbulkan konflik, Pengertian pemasyarakatan menurut kata yakni membuat agar jadi bermasyarakat atau dengan kata lain memasyarkatkan kembali.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹³

¹² Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi* (Malang: Aswaja pressindo, 2014), h. 46.

¹³ Depertemen Kehakiman, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (Jakarta: Depertemen Kehakiman, 1995)

Selanjutnya dalam undang-undang pasal 1 ayat 2 dirumuskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan pemasyarakatan untuk mengangkat kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga dan bertanggungjawab. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.¹⁴

Apabila diperhatikan tujuan sistem pemasyarakatan seperti yang telah dikemukakan terdahulu yaitu mengulangi kejahatan dengan jalan melakukan pembinaan para pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Penjelasan umum.

Selanjutnya sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana dan sebagai sistem menghendaki adanya out-put dari akibat ditetapkannya sistem pemasyarakatan tersebut. Maka dikemukakan sebagai berikut:

“Dengan sistem pemasyarakatan dimaksudkan sebagai suatu kebijakan pemerintah dalam memperlakukan para narapidana yang bersifat mengayomi narapidana sendiri yang dianggap tersesat jalanannya sehingga setelah selesai menjalani masalah pidananya ia kembali menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan secara wajar”.¹⁵

Jadi sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kejahatan tetapi bila usaha lainnya dalam mengurangi kejahatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan instansi-instansi yang terkait maka dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan tersebut hanya merupakan salah satu sarana saja.

3. Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan narapidana menurut PP nomor 31 tahun 1999 diatur dalam pasal 1 ayat 1, yang berbunyi:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani hukuman.

¹⁵ Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Arineca, 1988). h. 19.

Pada prinsipnya pembinaan narapidana adalah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan keaslian hidup dari terpidana. Setelah istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.¹⁶

Proses pembinaan hukum nasional yaitu ketika ditemukannya lambang keadilan yang serasi dengan kepribadian bangsa kita oleh menteri kehakiman Sahardjo berupa pohon beringin sebagai lambang pengayoman. Lambang pengayoman ini dimaksud guna menggantikan simbol keadilan negara barat yang dirupakan oleh Dewi Themis sebagai dewi keadilan.

Dengan demikian, menurut teori pengayoman tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia termasuk narapidana baik yang masih dalam lembaga pemasyarakatan maupun jika telah keluar kelak. Teori ini mengayomi baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksud sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 27.

Upaya dalam mewujudkan pengayomana tersebut termasuk di dalamnya adalah:

- a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan
- b. Mewujudkan keadilan sejati
- c. Mewujudkan keadilan
- d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial

Dari upaya tersebut kita dapat menyimak, bahwa kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketenteraman baik lahir maupun batin. Begitu pula halnya dengan ketenteraman, di anggap sudah ada apabila warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup fisik belaka.

Selanjutnya selama tidak melanggar hak merugikan orang lain, warga masyarakat maupun Narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan, tanpa rasa khawatir akan:

- a. Secara bebas melakukan apa yang dianggap benar
- b. Secara bebas akan dapat mengembangkan bakat dan minatnya
- c. Merasa selalu mendapat perlakuan yang wajar, begitu juga ketika ia telah melakukan suatu kesalahan.

Pembinaan terhadap Residivis dilakukan secara khusus atau berbeda dengan warga binaan lain yang bukan residivis, bertujuan agar tidak melakukan kejahatan lagi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan terhadap residivis, seperti ditempatkan pada tempat yang berbeda dengan warga binaan yang bukan tahanan residivis, pembinaan dalam bidang keagamaan dan diberikan pelatihan kerja atau keterampilan yang berguna sebagai bekal ketika bebas dan bergaul dengan masyarakat luas.¹⁷

Berdasarkan pasal 5 pembinaan, Sistem pembinaan pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: t.p., 2006), h. 125.

C. Tindak Pidana Ulang (Residivis)

1. Pengertian Residivis

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488.¹⁸

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai Residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.¹⁹

Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.²⁰

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 113.

¹⁹ Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), h. 68.

²⁰ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 143.

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang bisa dibilang ahli dalam hal ini:

a. Barda Nawawi Arie

Residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

b. I Made Widnyana

Mengatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:²¹

- a. Pelakunya adalah orang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seleuruhnya atau sebagian
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

²¹Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 431-432.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang (Residivis)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu: ²²

1. Residivis Umum (*General Recidive*)

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

2. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residive tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

²² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985), h. 166

Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, Seperti:

Pasal 486 Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487 Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 - 355, 438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu

yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 488 Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 — 138, 142 — 144, 207, 208, 310 — 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat di simpulkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana ulang (Residivis) dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima

tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Sedangkan Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:²³

Pasal 489 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”.

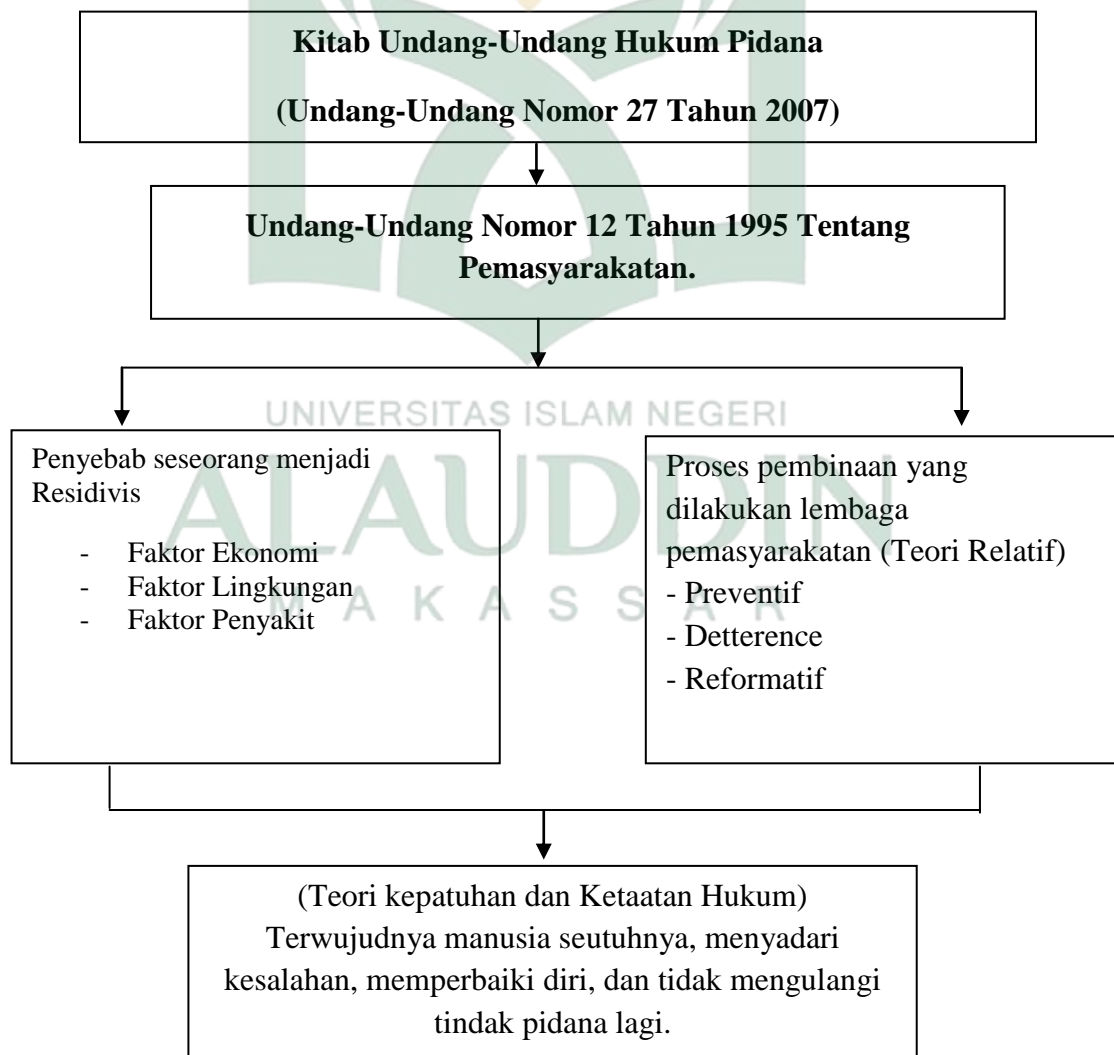
Pasal 495 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat hari”.

Pasal 512 ayat (3): “Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya peidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam han yang pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan.

²³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Burgelijk Wetboek*, buku III , bab I.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti dan didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai andasan penelitian. Maka dari itu untuk lebih memudahkan memahami substansi objek penelitian, maka di uraikan kerangka konseptual dengan singkat berdasarkan topik penelitian dengan beberapa variabel, Sebagai berikut.



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. *Lokasi dan Jenis Penelitian*

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kota Palopo, khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terjadi di wilayah kota palopo yaitu perkara pidana bagi tahanan Residivis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif. Dimana penelitian normatif adalah mengenai penelitian perpustakaan atau study dokumen.

B. *Pendekatan Penelitian*

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan yuridis.

Merupakan suatu pendekatan dengan kaitannya dengan undang-undang atau aturan hukumnya.

b. Live Case Study.

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

C. *Sumber Data*

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui proses wawancara dari pihak yang berwenang menangani permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku, dokumen perundang-undangan, artikel, hasil karya tulis para ahli, serta sumber lain yang berkaitan dengan yang diteliti.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Sesuai dengan tipe dan sifat penelitian ini maka metode pengumpulan data yang penulis pilih adalah studi dokumen (*documentary studies*), wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*). Pada prosesnya peneliti akan mengamati hal-hal yang konkret yang dapat diamati langsung seperti:

1. Faktor apa yang menyebabkan seorang narapidana mengulangi perbuatan melawan hukum kembali.
2. Sejauh mana peran lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan bagaimana proses pembinaan yang diberikan terhadap narapidana terkhusus narapidana residivis.

E. Instrumen Penelitian

Yang menjadi Instrumen penelitian pada penelitian ini di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo, meliputi pembuatan angket dan pedoman wawancara (*interview guide*).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis kualitatif, yang teknik analisis datanya dengan cara pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.

Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif maka teknik pengolahan datanya dengan cara proses editing kejelasan makna dan relevansi jawaban responden. Dan menarik kesimpulan dari wawancara tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan*

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Sulawesi Selatan.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo terletak di jalan Dr. Ratulangi km.08, kelurahan Buntu Datu, kecamatan Wara Barat Kota Palopo, dengan luas bangunan seluas $\pm 46.264 \text{ M}^2$. Dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh kepala kantor wilayah departemen kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara Bapak Budi Santoso, SH.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan lama yang berada di Jalan Opu Tasappaile no. 49 yang merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda.

Seiring pemekaran wilayah Kabupaten Luwu menjadi 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, maka kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIB Palopo (Tedja Sukmana, Bc.IP, SH) pada saat itu berinisiatif mengusulkan peningkatan status lembaga pemasyarakatan kelas IIB menjadi lembaga kelas IIA dan usul tersebut disetujui dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003.

Sejak didirikannya lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo telah 8 (delapan) kali penggantian pimpinan antara lain:

1. M. Marsoeki Dg. Malewa, Sebagai direktur daerah pemasyarakatan Palopo periode tahun 1962 sampai tahun 1974;
2. S. Duma Dase, Sebagai kepala kantor direktorat jendral pemasyarakatan daerah Palopo periode tahun 1974 sampai dengan tahun 1980;
3. Laba Dachlan, Sebagai kepala kantor direktorat jendral pemasyarakatan daerah Palopo periode tahun 1980 sampai dengan tahun 1986;
4. Kusnantoro, Sm.HK, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 1986 sampai dengan tahun 1992;
5. Dr. Lucas Joseph Mariatmantha, SH, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1995;
6. Mansyur Hasan, Bc.IP, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1999;
7. Sutrimansyah Ridwan, Bc.IP, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2003;
8. Tedja Sukmana, Bc.IP,SH, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004;

9. Sunar Agus, Bc.IP,SH., MH, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
10. Sukanto, Bc.IP,SH, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
11. Sri Pamudji, Bc.IP,S.IP, M.SI, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
12. Kusnali, A.Md.IP,S.Sos, MH, Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo periode tahun 2014 sampai dengan.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo terdiri atas ruang perkantoran, dan gedung blok hunian yang terdiri atas:

- a. Blok hunian anak dan wanita
- b. Blok A: Tahanan.
- c. Blok B: Pelaku Tindak Pidana Khusus (Narkotika).
- d. Blok C: Narapidana yang sudah menjalankan 1/2 dari masa hukumannya.
- e. Blok D: Narapidana yang sudah menjalankan 2/3 dari masa hukumannya.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo dengan area seluas $\pm 46.264 \text{ M}^2$

telah dibangun dengan fasilitas gedung yang terdiri dari:

- a. Ruang Perkantoran.
- b. Blok hunian.
- c. Ruangan pendidikan.
- d. Ruang perpustakaan.
- e. Ruang kunjungan.
- f. Poliklinik.
- g. Dapur.
- h. Aula.
- i. Ruang Ibadah (Masjid dan Gereja).
- j. Taman.
- k. Lapangan volly dan Lapangan tenis.
- l. Lahan perkebunan, Lahan peternakan, dan Lahan perikanan/tambak.
- m. Warung telephone/wartel.
- n. Kantin.

Adapun visi, misi, motto, tujuan, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut:

Visi : “Terciptanya unit pelaksana teknis yang profesional, transparan dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan demi terwujudnya tertib pemasyarakatan”.

Misi : “ Melaksanakan pembinaan perawatan serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan membangun kerjasama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesionalisme petugas pemasyarakatan”.

Motto : “Satu hati, Satu kata, Satu langkah, Satu pengabdian untuk pemasyarakatan”.

Tugas : Melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan (tersangka, Terdakwa dan Narapidana) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Melakukan pelayanan Narapidana/Tahanan.
2. Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana/Tahanan.
3. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja.
4. Melakukan pengamanan dan ketertiban.
5. Melakukan urusan tata usaha.

Struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung terhadap lapas dan penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di lapas.

2. Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan lembaga pemasyarakatan. kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan berada dibawah kepala lembaga pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala lembaga pemasyarakatan kela IIA Palopo.

Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban lapas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesatuan pengamanan lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap kegiatan rutinitas narapidana/anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;
- f. Mengkordinir petugas keamanan atau regu keamanan;
- g. Mengawasi dan mengontrol kegiatan yang berlangsung didalam maupun diluar lapas;
- h. Mengontrol pelaksanaan penjagaan;
- i. Melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan staff (anggota kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan);

3. Sub bagian tata usaha.

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan. Adapun sub bagian tata usaha membawahi 2 bagian dan tugasnya masing-masing sebagai berikut:

a. Urusan kepegawaian dan keuangan.

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

b. Urusan umum.

Mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga misalnya menampung kebutuhan kantor dan warga

binaan seperti atk untuk pegawai lapas dan kasur, bantal, baju seragam, tempat makan, alat mandi untuk warga binaan.

4. Seksi bimbingan Narapidana dan Anak didik.

Kepala seksi bimbingan Narapidana/Anak didik mempunyai tugas utama yaitu memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada narapidana dan anak didik. Adapun seksi bimbingan narapidana dan anak didik membawahi 2 sub dan tugasnya masing-masing sebagai berikut:

a. Sub seksi registrasi.

Mempunyai tugas melakukan pencacatan, membuat statistik dan dokumentasi sidik jari.

b. Sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan.

Mempunyai tugas melakukan bimbingan kemasyarakatan serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, melakukan pemeriksaan kesehatan, asimilasi, cuti pelepasan narapidana dan anak didik.

5. Seksi kegiatan kerja.

Kepala seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memprogramkan kegiatan kerja yang akan diberikan kepada warga binaan dan mencari instansi lain yang akan di ajak kerja sama serta mengkoordinir anggotanya.

Kepala seksi bagian kerja membawahi:

- a. Kepala sub seksi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja

Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan anak didik serta mengelola hasil kerja.

- b. Kepala sub seksi sarana

Mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

6. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib.

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan membagi tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kepala Administrasi keamanan dan tata tertib membawahi:

- a. Kepala sub seksi pelaporan tata tertib.

Mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- b. Kepala sub seksi keamanan.

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

Tabel I

Data pegawai lapas berdasarkan jenis kelamin

No	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Petugas		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo.	56	5	61

Adapun kegiatan bimbingan dan pelayanan yang diberikan kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan berupa:

a. Pembinaan Formal.

1. Pemberantasan buta huruf.
2. Kursus persamaan sekolah dasar (KPSD).
3. SMP terbuka.
4. Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
5. Paket KF.
6. Paket A dan Paket B.
7. Kejar belajar usaha (KBU).
8. Taman bacaan masyarakat (TBM).

b. Pembinaan kepribadian.

1. Pembinaan kesadaran beragama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa bernegara.
3. Pembinaan kedisiplinan.
4. Pembinaan kesadaran hukum.
5. Pembinaan berintegrasi diri dengan masyarakat.

c. Pembinaan kemandirian.

Diberikan melalui kegiatan berikut:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri (Pangkas rambut, menjahit).
2. Keterampilan untuk mendukung usaha industri (pembuatan lemari, kursi makan, kursi teras dan mimbar).
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing (pembuatan bingkai dan asbak rokok).
4. Keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian (kerja tambak, perkebunan dan peternakan).
5. Pembinaan bakat dan rekreasi.
6. Latihan kesenian (Karaoke, elekton dan vokal group).
7. Latihan olahraga (senam, futsal, volly ball, tenis meja, dan sepak takraw).

d. Pelayanan.

1. Pelayanan bantuan hukum.
2. Pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian obat-obatan, tenaga medis dan paramedis).

3. Pelayanan perpustakaan (perpustakaan pribadi bagi warga binaan di lapas dan perpustakaan keliling dari dinas pendidikan dan depag).
4. Pelayanan makanan dan perlengkapan (pemberian makanan sesuai dengan standar kalori yang memenuhi gizi dan baju seragam narapidana).

Dalam rangka kelancaran dan peningkatan program bimbingan dan pelayanan terhadap warga binaan secara berkesinambungan, maka lembaga pemasyarakatan klas IIA Palopo sebagai institusi vertikal telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Palopo. Adapun bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dengan jajaran pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan dinas pendidikan Kota Palopo.

Adapun kerjasama yang dilakukan dengan dinas pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) terbuka.

Kerjasama dengan dinas pendidikan Kota Palopo dimulai tahun 2000 sampai sekarang berupa pembukaan/penempatan SLTP terbuka lapas Palopo dengan sekolah bimbingan yang ditunjuk yaitu SLTP Negeri 5 Kota Palopo dan sudah 3 (tiga) kali melaksanakan ujian akhir nasional serta telah menamatkan 120 orang dengan siswa belajar narapidana dan bekas narapidana serta masyarakat sekitar kantor lembaga pemasyarakatan Palopo.

b. Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBP) lapas.

Disamping SLTP terbuka juga sudah dibentuk pusat kegiatan belajar masyarakat melalui nota kesepakatan bersama antara kepala dinas Dikpora Kota Palopo dan kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo serta forum komunikasi pusat kegiatan belajar masyarakat, tanggal 21 februari 2005, nomor : 421/226/DIKPORA/II/1005; Nomor: W15.E5-PP.01.01-94/II/2005; Nomor: 01/-PKBM/KT/II/2005 Tentang sumber pengembangan sumber daya manusia bagi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Kesepakatan tersebut telah terealisasi dalam bentuk kegiatan proses kegiatan belajar mengajar melalui beberapa paket kegiatan yaitu:

- a. Paket keakasaraan fungsional (KF).
- b. Paket A setara sekolah dasar.
- c. Paket B setara SLTP.
- d. Kejar belajar usaha (KBU).
- e. Taman bacaan masyarakat (TBM).

Tenaga pengajar (tutor) dari staf lapas dan tenaga guru dari Dikpora serta segala perlengkapan administari yang dibentuk sehubungan dengan proses belajar mengajar ditunjang oleh pihak dinas pendidikan Kota Palopo sebagai pihak pertama.

2. Dinas kesehatan Kota Palopo.

Kerjasama dengan dinas kesehatan Kota Palopo yaitu berupa pelaksana tindak lanjut surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri dengan surat kepala badan pengelola rumah sakit umum sawerigading Kota Palopo, selaku pelaksana harian dinas kesehatan, Nomor: 18/RSU.SWG/PLP/V2003, dan dikuatkan dengan surat Walikota Palopo, Nomor: 442.1/137/UM/V/2003, Tentang batuan pelayanan kesehatan untuk narapidana dan tahanan. Selama ini lapas Kelas IIA Palopo sejak surat walikota tentang perihal kerjasama tersebut diatas telah beberapa kali merealisasikan pengadaan obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan rawat inap gratis bagi narapidana yang tidak mampu di rumah sakit umum sawerigading Palopo.

3. Dinas Koperindag Kota Palopo.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo melalui seksi kegiatan kerja telah melaksanakan kerjasama dengan pihak Koperindag Kota Palopo, dalam bentuk pembuatan mimbar masjid seragam sekota Palopo, dalam nota kesepakatan Nomor: 800/VII/KOPERINDAG/2005 dan Nomor: W15.E5-PP.01.10-575 tanggal 29 juli 2014, tentang pengembangan sumber daya manusia bagi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan melalui keterampilan. Kerja sama ini berjalan dengan baik dan sudah terealisasi sekitar $\pm 85\%$, dengan sumber dana dari pemerintah Kota Palopo.

4. Kerjasama dengan Diklat SDM Kota Palopo.

Berdasarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri dan tindak lanjut oleh kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo sejak kurun waktu \pm 15 tahun, telah terlaksana berbagai bentuk kegiatan pelatihan keterampilan seperti:

- a. Keterampilan pertukangan kayu, anyaman rotan dan batu.
- b. Keterampilan kursus outomotif.
- c. Keterampilan ukir logam.
- d. Keterampilan elektro.
- e. Keterampilan penyambungan pipa air.

Kursus atau Latihan keterampilan tersebut diatas sudah dilaksanakan didalam lembaga pemasyarakatan dengan peserta terdiri dari narapidana yang telah menjalani masa pidana separuh dari masa hukumannya dan petugas lapas dalam bidang seksi kegiatan kerja.

5. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Palopo.

Kerjasama dengan pemerintah Kota Palopo sudah dilakukan sejak dimekarkannya Kota Palopo dari kabupaten Luwu melalui bentuk:

- a. Penggunaan tenaga asimilasi dalam pembersihan dan Penghijauna Kota Palopo.
- b. Turut serta dalam kegiatan perlombaan bangun praja dan kegiatan lain.

6. Kerjasama dengan kantor kementerian agama Kota Palopo.

Bentuk kerjasama dengan kantor departemen agama kota Palopo berdasarkan kesepakatan Nomor: Kd.21.25/III/a/BA/01.1-244/2006, tanggal 20 april 2006 tentang pembentukan pengurus taman pendidikan Al-Qur'an lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Kementerian agama Kota Palopo bersama dengan lembaga pemasyarakatan telah membentuk pengurus majelis taklim sebagai wadah organisasi menghimpun warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan mental spritual dalam lingkup lembaga pemasyarakatan.

Kepengurusan tersebut telah dilantik/dikukuhkan oleh kepala divisi pemasyarkatan kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia sulawesi selatan Bapak Sutrimansyah Ridwan, Bc.IP,SH,MH. Pada tanggal 22 april 2006 di aula Mappedeceng lembaga pemasyarakatan Palopo.

7. Kerjasama dengan dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kota Palopo.

Adapun kerjasama yang dilakukan yaitu berupa pemberian bibit tanaman yang di inginkan oleh lelabaga pemasyarakatan yang akan ditanam disekitar area lapas dan akan dikelola langsung oleh warga binaan yang memenuhi syarat untuk di asmiliasikan.

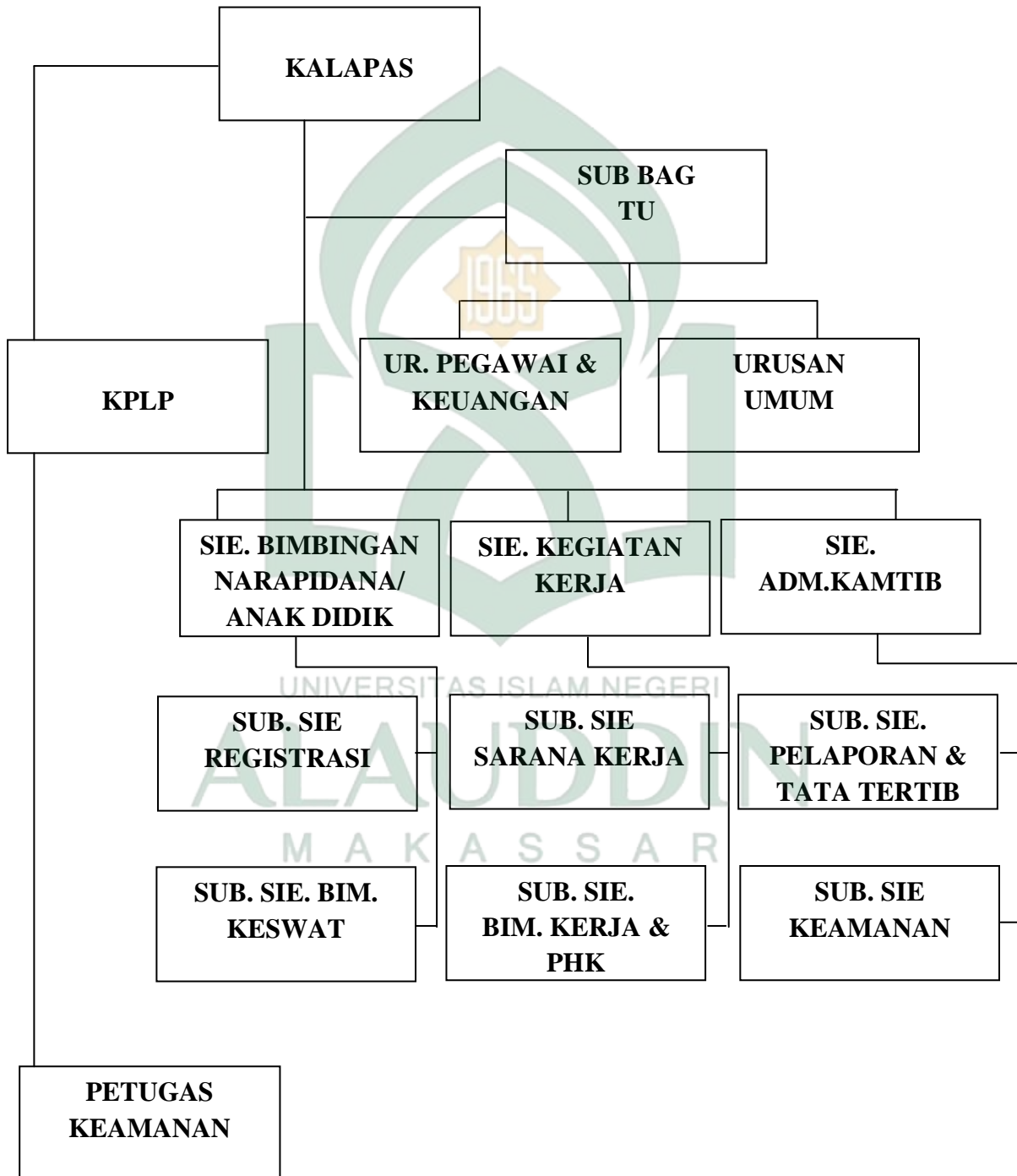
8. Sekolah tinggi agama islam negeri Kota Palopo.

Bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi agama islam negeri Kota Palopo yaitu dalam bentuk pembinaan dan bimbingan kerohanian melalui kegiatan dakwah/ceramah dan pengajian. Yang dimana dosen dari STAIN Palopo yang memberikan langsung bimbingan keagamaan kepada warga binaan yang beragama islam.¹

¹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, *Gambaran Umum Lapas Palopo* (Palopo: Lapas Palopo, 2014), h.1-10.

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO



Tabel II
Kepala lembaga pemasyarakatan berdasarkan bidangnya

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kusnali, Amd.ip, S.Sos, MH	Kepala lembaga pemasyarakatan
2.	Arrijal, S.Sos	Kepala sub bagian tata usaha
3.	Sabnur	Kepala urusan kepegawaian & keuangan
4.	Benaya petana, SH	Kepala urusan umum
5.	Abidin karim, S.Sos	Kepala seksi bimbingan napi dan anak didik
6.	Syamsuddin, S.Sos	Kepala seksi kegiatan kerja
7.	Abd.harris, SH	Kepala seksi administrai keamanan & tata tertib
8.	Amiruddi, Sm.HK	Kepala sub seksi registrasi
9.	Usman, SE	Kepala sub seksi sarana kerja
10.	Lahmuiddin, SH	Kepala sub seksi pelaporan & tata tertib
11.	Mardi	Kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan
12.	Sujono talimbing, SH	Kepala sub seksi bimbingan kerja & pengelolaan hasik kerja
13.	Drs. Suherman	Kepala sub seksi keamanan
14.	KB.A.Kaso, S.Sos, SH	Kepala kesatuan pengamana lapas

B. Analisis Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Untuk mempertajam gambaran umum mengenai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, berikut merupakan data jumlah warga binaan.

Tabel III
Data Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Jenis Kejahatan

No.	Jenis kejahatan	Narapidana	Tahanan
1.	Mata uang	0 Orang	0 Orang
2.	Perjudian	0 Orang	16 Orang
3.	Pembunuhan	15 Orang	0 Orang
4.	Pencurian	28 Orang	29 Orang
5.	Perampokan	1 Orang	1 Orang
6.	Penipuan	0 Orang	1 Orang
7.	Narkotika	37 Orang	24 Orang
8.	Korupsi	3 Orang	0 Orang
9.	Kepabeanan	0 Orang	0 Orang
10.	Kriminal umum	1 Orang	0 Orang
11.	Psikotropika	0 Orang	0 Orang
12.	Teroris	0 Orang	0 Orang
13.	Perlindungan anak	36 Orang	7 Orang

14.	Kehutanan	0 Orang	0 Orang
15.	Hak cipta	0 Orang	0 Orang
16.	Kekerasan dalam rumah tangga	3 Orang	1 Orang
17.	Senjata tajam/senjata api/b.peledak	3 Orang	1 Orang
18.	Merusak barang	0 Orang	0 Orang
19.	Keamanan negara/makar/politik	0 Orang	0 Orang
20.	Terhadap ketertiban	0 Orang	0 Orang
21.	Pembakaran	1 Orang	0 Orang
22.	Penyuapan	0 Orang	0 Orang
23.	Memalsukan materai/surat	0 Orang	0 Orang
24.	Kesusilaan	1 Orang	1 Orang
25.	Penculikan	0 Orang	1 Orang
26.	Penganiayaan	0 Orang	25 Orang
27.	Memeras/mengancam	2 Orang	0 Orang
28.	Penggelapan	0 Orang	6 Orang
29.	Desersi	13 Orang	0 Orang
30.	Perbankan	0 Orang	0 Orang
31.	Penadahan	6 Orang	0 Orang
32.	Migas	0 Orang	0 Orang
33.	Subversi	0 Orang	0 Orang
34.	Pornografi	0 Orang	1 Orang

35.	Perikanan	0 Orang	0 Orang
36.	Pelanggaran lalu lintas	0 Orang	4 Orang
37.	Kesehatan	0 Orang	0 Orang
38.	Human trafficking	0 Orang	0 Orang
39.	Pencucian uang	1 Orang	0 Orang
40.	Kenakalan	1 Orang	0 Orang
Jenis Kelamin Jenis Umur - Anak-anak : 8 Orang			
Pria : 259 Orang Dewasa : 252 Orang			
Wanita : 10 Orang Lansia : 9 Orang			
Jumlah = 269 Orang			
Narapidana		Tahanan	
BI : 115 Orang		AI : 9 Orang	
BII A : 35 Orang		AII : 19 Orang	
BII B : 0 Orang		AIII : 86 Orang	
BIII : 1 Orang		AIV : 4 Orang	
Hukuman Mati : 0 Orang		AV : 0 Orang	
Hukuman seumur hidup : 0 Orang		Tahanan Militer : 0 Orang	
Jumlah = 151 Narapidana		Jumlah = 118 Tahanan	
Total = 269 Warga Binaan			

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (25/01/2016)

Tabel IV

Data Jumlah Narapidana Residivis

Jenis kejahatan	Jumlah
Narkoba	5 Orang
Pencurian	9 Orang
Pembunuhan	1 Orang
Pencabulan	1 Orang
Jumlah = 16 Orang Narapidana Residivis	

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (25/01/2016).

Tabel V

Data Jumlah Tahanan Residivis

Jenis kejahatan	Jumlah
Pencurian	7 Orang
Penggelapan	1 Orang
Penganiyaan	2 Orang
Penipuan	1 Orang
Jumlah = 11 Orang Tahanan Residivis	

Sumber Data: Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Palopo (25/01/2016).

C. Faktor Seseorang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kembali

Di era ini kriminalitas atau tingkat kejahatan sangat marak terutama di lingkungan sosial Kota Palopo banyak dijumpai berbagai kasus atau jenis kejahatan, bahkan pelaku tersebut tidak hanya melakukan kejahatan satu kali saja namun ada yang dua kali bahkan berkali-kali, walaupun pelaku tersebut ditangkap dan dihukum pidana, tidak membuat mereka jera. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku mengulangi perbuatan melawan hukum kembali.

Gabriel tarde dan Emile durkheim menyatakan bahwa kejahatan itu insiden alamiah, merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial. Dimana secara mutlak terdapat minimum kebebasan individual untuk berkembang.²

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo bahwa faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan kejahatan kembali yakni diakibatkan oleh dua faktor yang dominan yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

1. Faktor Ekonomi.

Faktor kejahatan residivis di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang kembali melakukan perbuatan melawan hukum mayoritas di karenakan faktor ekonomi atau keuangan. Gaji yang minim, pengangguran akibat tetatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, membuat kesulitan bagi mereka yang kurang berpendidikan dan tidak mempunyai skill mengakibatkan mereka tidak mempunyai pekerjaan, meskipun diantara mereka ada yang mempunyai pekerjaan namun tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari dikarenakan meningkatnya biaya hidup. Hal ini yang menyebabkan seorang residivis melakukan perbuatan melawan hukum kembali, misalnya mencuri atau menjambret demi menghidupi keluarga mereka atau menolong keluarganya yang sedang sekarat seperti contoh salah satu narapidana lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo berinisial AJ mencuri demi biaya operasi cesar istrinya.³

Menurut Aristoteles dan Thomas aquino menyatakan bahwa faktor yang menimbulkan kejahatan adalah kemiskinan dan kemelaratan diyakini sebagai sumber timbulnya kejahatan. Kemiskinan kronis mengakibatkan orang putus asa, sehingga satu-satunya jalan untuk terbebas dari belenggu kesengsaran adalah melakukan kejahatan.⁴

³ Inisial Aj, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, *Wawancara Tulis*, Palopo, 30 Januari 2016

⁴ Mywap, "Teori Kejahatan (Kriminalitas)", Mywapblog.<http://sosiatoris.mywapblog.com/teori-kejahatan-kriminalitas.html> (26 Februari 2016)

2. Faktor Lingkungan.

Selain faktor ekonomi yang mengakibatkan seseorang mengulangi kejahatan ada juga akibat faktor lingkungan, terutama lingkungan tempat tinggal dan teman pergaulan. Seperti kata Bapak Mardi selaku kepala sub seksi bimbingan kerja dan perawatan mengatakan bahwa:

“ Ada yang mengatakan di luar sama sekali tidak pernah sholat, setelah didalam sudah berjamaaah dan sudah tidak pernah lalai, tetapi itu kembali lagi ke individunya dan faktor lingkungannya”.⁵

Faktor lingkungan merupakan tempat pembentukan watak seseorang. Lingkungan yang baik akan membuat seseorang menjadi baik begitu juga sebaliknya, lingkungan yang tidak baik akan membuat seseorang tidak baik pula.

Kejahatan diakibatkan oleh lingkungan social yang buruk. Lingkungan social merupakan sebuah tempat dimana individu belajar dan beradaptasi. Lingkungan social yang buruk memberikan pengaruh-pengaruh eksternal yang mengarahkan pada kejahatan dan kemudian akan ditiru oleh individu yang bersangkutan. Baik buruknya suatu lingkungan social, memberikan efek terhadap individu yang berada di lingkungan tersebut.

⁵ Mardi (46 Tahun), Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan kemasyarakatan dan perawatan, *Wawancara Pribadi*, Palopo, 23 Januari 2016.

D. Analisis Hukum Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan.

Tugas pokok lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik baik tersangka, terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan undang-undang dengan maksud membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Perlakuan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sejauh ini dalam pemberian pembinaan terhadap warga binaan baik narapidana biasa maupun resdivis tidak ada perlakuan khusus, semuanya diperlakukan sama dan tidak dibedakan baik dari segi fasilitas yang diberikan maupun pembinaan serta penempatannya di lembaga

pemasyarakatan. hal ini mengacu pada pasal 5 poin (b) undang-undang pemasyarakatan yaitu tentang persamaan perlakuan dan pelayanan⁶.

Berdasarkan asas sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Seperti yang dikatakan Bapak Abidin karim, S.Sos selaku kepala seksi bimbingan narapidana dan anak didik bahwa:

“Semua warga binaan dilapas palopo diperlakukan sama dan tidak ada perbedaan, baik itu tahanan maupun narapidana residivis maupun yang bukan. Fasilitas dan pembinaan yang diberikan juga sama. Residivis juga dapat di asimilasikan dan mendapatkan remisi.”⁷

⁶Dartemen Kehakiman, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1995).

⁷ Abidin Karim (49 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, *Wawancara Pribadi*, Palopo, 22 Januari 2016.

Adapun yang harus diperhatikan petugas lapas sebagai berikut.

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menaggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost beneit principle*).
- d. Penggunan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampuan beban tugas (*overbelasting*).⁸

Pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan residivis dan bukan residivis di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo diperlakukan sama dengan diberikannya pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk membuat warga binaan menjadi lebih baik dan sadar terhadap segala perbuatan salah yang pernah dilakukan, serta tidak mengulanginya kembali.

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 135.

Dan pembinaan kemandirian yang bertujuan agar warga binaan kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan diberikannya pembinaan ataupun diperlakukan sama yaitu agar residivis merasa tidak didiskriminasi ataupun merasa dibedakan yang dapat menyebabkan mental mereka terganggu dan bisa semakin jahat.

Adapun pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yakni:

1. Pembinaan kepribadian

- a. Pembinaan kesadaran beragama.

Pembinaan kesadaran beragama atau pembinaan ketakwaan diberikan kepada warga binaan agar mereka mengerti, taat dan patuh terhadap agama masing-masing sesuai dengan keyakinan mereka.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembinaan seperti kesadaran berbangsa dan bernegara diajarkan kepada warga binaan itu seperti diikutkannya warga binaan pada kegiatan hari besar, contoh 17 agustus.

- c. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan ini dilakukan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan yang mereka pernah perbuat agar nantinya pada saat bebas

tidak melakukan kejahatan ulang. Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan cara diberikannya penyuluhan hukum terhadap warga binaan.

d. Pembinaan berintegrasi diri dengan masyarakat.

Pembinaan ini diberikan kepada warga binaan yang telah menjalankan $\frac{1}{2}$ dari masa hukumannya dan telah memenuhi syarat yaitu di asimilasikan keluar dari gedung lembaga pemasyarakatan, hal ini untuk memudahkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat, agar mudah bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya jika sama hukuman telah berakhir.

2. Pembinaan kemandirian.

- a. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Seperti: pangkas rambut, membuat bingkai, membuat asbak rokok, percetakan pavin block
- b. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha industri. Seperti: pembuatan lemari, kursi makan, kursi teras, dan mimbar.
- c. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian. Seperti: perkebunan, persawahan dan peternakan.

Pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan berdasarkan penggolongan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12 butir (1), dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan atas dasar penggolongan sebagai berikut:

“Umur, Jenis Kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, Jenis kejahatan, Kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.

Adapun hak-hak narapidana, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan kejahatan kembali (residivis) diakibatkan oleh faktor sebagai berikut:
 - a. Faktor ekonomi atau keuangan, gaji yang minim sedangkan tingkat kebutuhan tinggi, pengangguran akibat ketatnya persaingan dan kurangnya skill yang dimiliki. Oleh karena itu kemiskinan dan kemelaratan menjadi penyebab sumber timbulnya kejahatan dan tidak pidana ulang.
 - b. Selain itu faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yaitu faktor lingkungan, kejahatan dapat dikarenakan lingkungan sosial yang buruk. Dimana lingkungan adalah tempat pembentukan watak seseorang, lingkungan yang baik akan membuat seseorang baik pula begitu juga sebaliknya.
2. Proses pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIa Palopo terhadap tahanan residivis yaitu ada dua pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang dimana proses pembinaan yang diberikan terhadap tahanan residivis pada umumnya sama dengan tahanan biasa.

Adapun proses pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:

a. Pembinaan kepribadian

Yaitu proses pembinaan yang diberikan untuk menyadarkan dan memperbaiki narapidana dari perbuatannya agar tidak mengulangnya kembali. Dengan cara diberikannya pembinaan berupa, pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kesadaran hukum dan Pembinaan berintegrasi diri dengan masyarakat.

b. Pembinaan kemandirian.

Yaitu proses pembinaan yang diberikan kepada semua narapidana berupa pemberian keterampilan, seperti membuat bingkai, meja, kursi, pavin block, persawahan dan peternakan dan sebagainya, yang dapat menunjang usaha mandiri para narapida jika telah bebas.

B. Implikasi

1. Dalam hal mengurangi tindak pidana atau seseorang kembali melakukan kejahatan perlu adanya sikap yang tegas dari pemerintah dan lingkungan tempat tinggal mantan narapidana,.

a. Seperti pemerintah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan memberikan gaji yang selayaknya kepada pekerja agar bisa menafkahi dirinya serta keluarganya dan tidak terpuruk akibat kemiskinan atau ekonomi, selain itu perlu adanya kerja sama antara lembaga

pemasyarakatan dengan instansi atau perusahaan-perusahaan lain untuk bisa menyalurkan mantan narapidana bekerja di instansi atau perusahaan tersebut, agar tidak melakukan kejahatan kembali saat sudah bebas.

- b. Selain itu disarankan juga agar lingkungan sosial utamanya lingkungan eksternal (keluarga) agar pengawasan dan bimbingan terhadap mantan narapidana lebih diperhatikan lagi, utamanya terhadap lingkungan sosial mantan narapidana agar tidak sembarang terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, serta masyarakat sekitar tempat tinggal mantan narapidana agar tidak takut maupun mendiskriminasi mantan narapidana.
2. Disarankan agar proses pembinaan kepribadian yang diberikan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIa Palopo terhadap narapidana lebih intensif lagi dalam memberikan pembinaan dan waktu pemberian pembinaan ditambah lagi, yang seminggu sekali bisa menjadi dua sampai kali seminggu. agar mereka betul-betul sadar, iman mereka kuat dan tidak mengulangi perbuatan mereka kembali jika telah bebas.

Adapun pembinaan kemandirian yang dibutuhkan yaitu disarankan keterampilan-keterampilan yang menunjang mereka di zaman modern ini, misalnya kursus komputer, kursus bahasa inggris dan cara menjalankan mesin fotokopi.

DAFTAR PUSTAKA

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Widodo dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Penologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Djamali R. Abdoel, *Hukum Pengantar Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: liberty.

Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: armico, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Hamzah Andi , *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Atmasasmita, Romli. *Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni, 1975.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armoco, 1985.

W Bawengan, Gerson. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Primata, 1979.

Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Gunakaya, Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Arineca, 1988.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: 2006.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Ummul Mukminin* (Jakarta Selatan: Wali, 2010).

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Burgelijk Wetboek”

Departemen Kehakiman, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1995.

Zainal Amrullah, “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Tahanan dan Narapidana di Kabupaten Sinjai”. *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2009).

Tenrisoji Amiruddin, Andi Soraya. “Pemenuhan Hak Narapidana dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Kota Pare-Pare”. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

Atikah, Ika. “Pembinaan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ika Atikah* (Taerang: STIH PAINAN, 20 November 2014) <http://lppm.stih-painan.ac.id/pembinaan-narapidana-di-dalam-lembaga-pemasyarakatan.html> (15 Juni 2015).

Ami. “Lembaga Pemasyarakatan juga Lembaga Pendidikan”, *Blog Ami*. <http://ami62.blogspot.co.id/2011/01/lembaga-pemasyarakatan-lp-juga-lembaga.html> (29 Juni 2015).



ANGKET PENELITIAN

“ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TAHANAN RESIDIVIS (STUDY KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO)”.

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi, saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Hukum Peminatan Hukum Pidana ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis”. Adapun salah satu cara untuk melengkapi skripsi peneliti adalah dengan menyebarkan angket ini kepada responden. Untuk itu, Peneliti mengharapkan kesediaan anda sekalian untuk mengisi angket ini. Atas kesediaan dan kerjasamanya, Saya ucapkan banyak terima kasih.

1. Apa penyebab Anda masuk di lembaga pemasyarakatan?
 - a. Mencuri c. Membunuh
 - b. Narkoba d.
2. Sudah berapa kali anda masuk lembaga pemasyarakatan?
 - a. Pertama kali c. 3 kali
 - b. 2 kali d.
3. Faktor apa Anda mengulangi perbuatan melawan hukum kembali?
 - a. Ekonomi c. Penyakit
 - b. Lingkungan d.
4. Apa kegiatan Anda selama masuk di lembaga pemasyarakatan?
 - a. Pengembangan bakat c. Rajin belajar
 - b. Belajar keterampilan d.

5. Apa Anda menyesal telah masuk di lembaga pemasyarakatan?
- a. Menyesal
 - b. Sangat menyesal
 - c. Tidak menyesal
 - d.
6. Pembinaan apa yang Anda senangi di lembaga pemasyarakatan?
- a. Belajar keterampilan
 - b. Kegiatan keagamaan
 - c. Olahraga
 - d.
7. Berapa kali pembinaan yang Anda dapatkan dari petugas lapas?
- a. 1 kali sehari
 - b. 1 kali seminggu
 - c. 1 kali sebulan
 - d.
8. Bagaimana tanggapan Anda tentang sikap petugas lapas?
- a. Baik
 - b. Sangat baik
 - c. Tidak baik
 - d.
9. Apa menurut Anda fasilitas lapas sudah memadai?
- a. Memadai
 - b. Sangat memadai
 - c. Tidak memadai
 - d.
10. Apa anda betah tinggal di lapas?
- a. Betah
 - b. Sangat betah
 - c. Tidak betah
 - d.
11. Siapa yang sering menjenguk Anda?
- a. Anak
 - b. Istri
 - c. Saudara
 - d.

Terima kasih

Daftar Pertanyaan

1. Luas bangunan dan alamat lapas/Geografis/kondisi fisik bangunan
2. Lapas mulai beroperasi kapan
3. Fasilitas apa yang ada di lapas
4. Bagaimana sejarah lapas palopo
5. Apa visi, misi, tujuan, fungsi dan sasaran lapas
6. Jumlah petugas lapas(Pria? Wanita?) dan bagian-bagiannya
Contoh: Tenaga kesehatan, petugas keamanan dan persenjataan
7. Apakah lapas bekerjasama dengan instansi lain dan apa fungsinya?
Contoh: Lsm, Dinas pendidikan dll
8. Dari mana sumber dana untuk konsumsi, kesehatan, dan pembinaan yang diberikan tahanan.
9. Tugas dan fungsi pegawai lapas itu apa
10. Berapa jumlah total tahanan di lapas dan jumlah tahanan residivis (dalam setahun berapa tahanan residivis yang masuk kembali ke lapas)
11. Apa faktor penyebab seseorang jadi residivis
12. Pembinaan seperti apa yang diberikan petugas lapas kepada tahanan (prosesnya) dan apakah pembinaan tahanan biasa dengan tahanan residivis sama atau tidak.
Contoh: kerajinan misalnya (Setelah jadi di salurkan kemana?)
13. Berapa kali biasanya dilakukan pembinaan
14. Bagaimana pengaruh pembinaan yang telah diberikan kepada tahanan
15. Bagaimana keadaan tahanan residivis di lapas
16. Apakah tahanan biasa dan tahanan residivis dibedakan tempatnya
17. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan tahanan, kebanyakan itu apa dan seperti apa
18. Setelah diberikan pembinaan keagamaan, bagaimana kesadaran beragama tahanan dan agama apa yang mendominasi di lapas.
19. Apa hak dan kewajiban tahanan
20. Apa hak dan kewajiban petugas terhadap tahanan dan sejauh mana
21. Menurut anda sebagai petugas lapas sudah efektif tidak lapas menangani tahanan
22. Apakah ada tahanan yang tidak mau di bina atau membangkang
23. Apakah pernah ada tahanan yang pernah melarikan diri, lalu didapat? Ada tidak sanksinya?
24. Setelah bebas, apakah tahanan bebas begitu saja atau ada tindak lanjut dari lapas seperti: pemulihan nama baik, agar dapat diterima ditempat kerja kembali dan lingkungan masyarakat.
25. Apa kendalanya lapas atau hambatan yang di hadapi tugas selama ini



Nomor : W.23.UM.01.01- 13
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Penelitian**

18 Januari 2016

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
di - Palopo

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 00527/P2T-BKPM/19.36P/VII/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **Fiqhi Jabbar**
Nomor Pokok : 10500112047
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat : Jln. Slt Alauddin No.36 Samata-Gowa

Bermaksud untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo untuk menyusun **Skripsi** dengan judul "**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TAHANAN RESIDIVIS (STUDY KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA PALOPO)**", yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2016 s/d 15 Februari 2016, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimah kasih

An Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
d.b. Kepala Bagian Umum,

Ismail Pabitte, SE, MH
NIP. 19601001 199103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan)
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
4. Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Peninggal.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PALOPO
Alamat :Jl. DR. Ratulangi Kam. 08 – Telp. (0471) 3307150

SURAT KETERANGAN
Nomor: w23.E5-UM.01.01- 112

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIQHI JABBAR
Tempat/ Tgl Lahir : Palu, 12 September 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Samata
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Study Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo)

Benar-benar telah mengadakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai 15 februari 2016 dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



Palopo, 15 Februari 2016
KEPALA,

KUSNADI, Amd.IP.,S.Sos.,MH
NIP. 19700807 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 15 Januari 2016

Kepada

Nomor : 00527 /P2T-BKPM/19.36P/VII/01/2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum & HAM
Prov. Sulsel

di-

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syaria'ah & Hukum UIN Alauddin Makassar Makassar Nomor :
SI.1/PP.00.9/106/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Fiqhi Jabbar
Nomor Pokok : 10500112047
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 36 Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi,
dengan judul :

**"ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TAHANAN
RESIDIVIS (STUDY KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA PALOPO)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Januari s/d 15 Februari 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



A. M. YAMIN, SE., M.S

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19610513 199002 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Dekan Fak. Syaria'ah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peringkat

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 52/Tahun 2015
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAFT/SKRIPSI
TAHUN 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
5. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2008 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Ahkam Jayadi, SH., MH
: 2. Abdi Wijaya, S.S., M.Ag

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : **FIQHI JABBAR**

N I M : 10500112047

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ***Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab lembaga pemasyarakatan "lapas" atas sanksi tahanan residivis (study kasus lembaga pemasyarakatan kelas Ila kota palopo)***

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 23 November 2015

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 196210161990031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 SamataSungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/106/2016
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 06 Januari 2016

Kepada

Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**
c.q Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : FIQHI JABBAR
N I M : 10500112047
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Samata, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

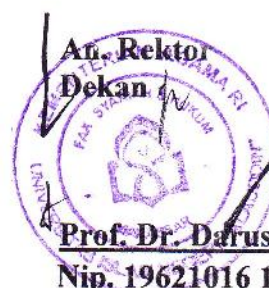
"Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Study Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Kota Palopo)".

Dengan dosen pembimbing:

1. **Ahkam Jayadi, SH., MH**
2. **Abdi Wijaya, S.S., M. Ag.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kota Palopo terhitung mulai tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2016.

Demikian harapan kami dan terima kasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
Nip. 19621016 199003 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

**“ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP TAHANAN RESIDIVIS (STUDY KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO)”**

Disusun dan diajukan oleh :

FIQHI JABBAR

Nim: 10500112047

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
Penulisan Skripsi
Pada tanggal : 01 Januari 2015

Pembimbing I



Ahkam Jayadi, SH., MH
Nip.19611024 198703 1 003

Pembimbing II



Abdi Wijaya, S.S., M. Ag.
Nip. 19711005 200501 1 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Istiqamah, S.H.,M.H

Nip. 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

Nip. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 123 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 15 Februari 2016 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata
: 15 Februari 2016

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKD/UDIS	MKKP	
01	02	03	04	05	06
1	Ratnawati 10500112028	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I	Dr. Hamsir, S.H, M.Hum	Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, N Hj. Suriani, S.Sos, M.M St. Warsida S.Ag
2	Figini Jabbar 10500112047	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag	Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Dra. Hj. Suharti, M.Pd Nurhayati Wahid
3	Nurul Kurnia 10500112062	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Dr. Sohra, M.Ag	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Dr. Hamsir, S.H, M.Hum Dra. Andi Masniah Musyfkah, S.Hi, M.Hi



19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 47 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Fiqhi Jabbar
N I M : 10500112047
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palopo)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum
Penguji I : Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag
Penguji II : Eman Sualaiman, S.H, M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Hj. Helmi Sulaiman, SH
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 7 Maret 2016
Dekan,
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : SI.1/PP.00.9/ //69/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 7 Maret 2016

Kepada

- Yth.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua Majelis)
2. Dr. Hamsir, M.Hum (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag (Penguji I)
4. Eman Solaiman, S.H, M.H. (Penguji II)
5. Ahkam Jayadi, S.H,M.H. (Pembimbing I)
6. Abdi Wijaya (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Fiqhi Jabbar
N I M : 10500112047
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016
Buka Sidang : Pukul 08.30
Waktu : Pukul 09.00 Wita – selesai
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sultan Alauddin No 36, Romang Polong - Gowa Telp. (0411) 841879

TRANSKRIP

Nomor :

Nama Mahasiswa : Fiqhi Jabbar
No. Induk Mahasiswa : 10500112047
Terdftar Mulai : 0
Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Lahir : Palu
Tanggal Lahir : 12 September 1993
Lulus Sarjana :
Nomor Ijazah :

No.	Mata Kuliah	sks	Nilai Huruf	Nilai Mutu	No.	Mata Kuliah	sks	Nilai Huruf	Nilai Mutu	
1	Akidah Akhlak	2	A	8	39	Hukum Perikatan	2	A	8	
2	Bahasa Inggris	2	B	6	40	Pengantar Hukum Ekonomi	2	B	6	
3	Bhs Indonesia	2	A	8	41	Filsafat Hukum	2	A	8	
4	Ilmu Al-Quran	2	B	6	42	Hukum Acara Peradilan Agama	2	A	8	
5	Pend Pancasila & Kewarganegaraan	2	B	6	43	Hukum Acara Peratun	2	B	6	
6	Pengantar Hukum Indonesia	3	A	12	44	Hukum Kejahatan Internasional (Peminatan H. Keadanaan)	2	B	6	
7	Pengantar Ilmu Hukum	3	B	9	45	Hukum Kesehatan (Peminatan H. Keadanaan)	2	A	8	
8	Sejarah Peradaban Islam	2	A	8	46	Hukum Lingkungan	2	A	8	
9	Bahasa Arab	2	A	8	47	Hukum Penintensier (Peminatan H. Keadanaan)	2	A	8	
10	Hukum Adat I	2	A	8	48	Hukum Perburuhan	2	A	8	
11	Hukum Perdata	3	A	12	49	Hukum Pertambangan	2	B	6	
12	Hukum Pidana I	3	A	12	50	Perancangan Kontrak	2	B	6	
13	Hukum Tata Negara	3	B	9	51	Teknik Perundang-Undangan	2	C	4	
14	Ilmu Negara	2	A	8	52	Hukum Perizinan	2	A	8	
15	Pengantar Filsafat Ilmu Hukum	2	A	8	53	Hukum Perlindungan Anak	2	A	8	
16	Pengantar Sosiologi Hukum	2	A	8	54	Hukum Perlindungan Konsumen	2	A	8	
17	Hukum Administrasi Negara	3	B	9	55	Hukum Pidana Ekonomi	2	A	8	
18	Hukum Agraria 1	2	B	6	56	Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Peminatan H. Keadanaan)	2	B	6	
19	Hukum Internasional	2	A	8	57	Hukum Pidana Korupsi (Peminatan H. Keadanaan)	2	A	8	
20	Hukum Keuangan Negara	2	C	4	58	Kriminologi (Peminatan H. Keadanaan)	2	A	8	
21	Hukum Pidana 2	3	B	9	59	Logika Hukum	2	A	8	
22	Hukum Waris dan Benda	2	A	8	60	Praktek Bantuan Hukum Keluarga	2	A	8	
23	Ilmu Fiqih	2	A	8	61	Perbandingan Kuahp dan Kuahpm	2	A	8	
24	Ilmu Hadist	2	B	6	62	Praktek Pearadilan	2	A	8	
25	Kewirausahaan	2	A	8	63	Praktek Peradilan Semu	4	B	12	
26	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	A	8	64	Kuliah Kerja Nyata	4	A	16	
27	Tafsir Ahkam	2	B	6	Jumlah			140		505
28	Ushul Fikih	2	A	8	Indeks Prestasi : 3.61 Predikat Lulus : Sangat Memuaskan					
29	Delik-Delik Dalam Kuhipidana	2	A	8						
30	Delik-Delik di Luar Kuhipidana (Mwk-H. Pidana)	2	A	8						
31	Etika dan Tanggungjawab Profesi	2	A	8						
32	Hadis Ahkam	2	A	8						
33	Hukum Acara Pidana	2	B	6						
34	Hukum & Ham	2	A	8						
35	Hukum Acara Perdata	3	B	9						
36	Hukum Kelembagaan Negara	2	A	8						
37	Hukum Kewarisan Islam	2	B	6						
38	Hukum Pajak	2	A	8						

Judul Skripsi :

Pembimbing TA I :

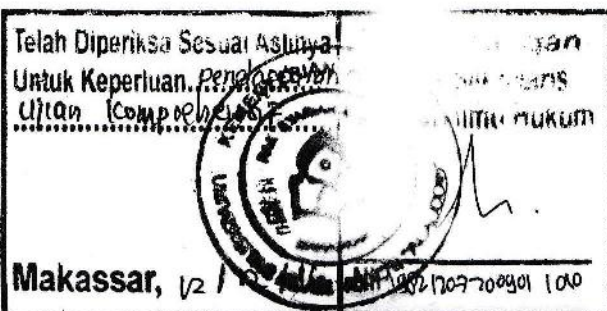
Pembimbing Akd. : Muhammad Thahir Maloko, Dr., M.Hi.

Nilai D : 0 sks

Lama Studi : 0 th 0 bl

Gowa, 12 Februari 2016

NIP.



BIOGRAFI PENULIS



FIQHI JABBAR, Di lahirkan pada tanggal 12 september 1993 di kota Palu, anak tunggal dari Ibunda yang Bernama Nursiah dan ayahanda bernama Jabbar.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai di Taman kanak-kanak Pertiwi Palopo dan kemudian dilanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 476 Makalua Palopo dan tamat tahun 2006 di tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo, tamat di tahun 2009 dan di tahun yang sama pula penulis melanjutkan sekolah tingkat atas di SMA Negeri 3 Palopo, Dan di tahun 2012 penulis menempuh pendidikan tinggi di kampus peradaban yaitu diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah & Hukum.

Pengalaman di kampus walau singkat tapi pernah masuk organisasi Lembaga Dakwa Kampus (LDK); Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syari'ah & Hukum, Jurusan Ilmu Hukum; Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) dan Study Club.

Tepat tiga tahun setengah penulis telah merampungkan studi S1 dan selesai pada Bulan Maret Tahun 2016. Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan penulis sangat berharap ilmu yang didapatkan selama dibangku perkuliahan dapat Berberkah.